

Graphical abstract



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN DANA HIBAH KEAGAMAAN DI BAGIAN KESEJAHTRAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

¹Murlia, ²Muhammad Massyat, ³Yusuf Daud, ⁴Achmad Sulfikar

^{1,2,3}Universitas Al Asyariah Mandar, ⁴Institut Agama Islam Negeri Palopo

*Corresponding author

murlia131@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of religious grant aid policies in the people's welfare section of the regional secretariat of Mamasa Regency. This research is a qualitative research with a descriptive approach which aims to determine the implementation of the religious grant aid policy in the people's welfare section of the regional secretariat of Mamasa Regency. Sources of data in this study were informants totaling 12 people. Data was collected by means of observation, interviews, and documentation. The analytical technique used is qualitative data analysis which is a description and interpreting of data obtained in the field from existing informants.

The results of the analysis show that the implementation of the religious grant aid policy in the people's welfare section of the Mamasa regional secretariat is related to indicators that affect the sustainability of services in the people's welfare section of the regional secretariat, among others. Communication, Resources, Disposition, and Implementation, which concluded that the mechanism and stages of distributing grant funds including monitoring, evaluation and verification activities by the team were available even though there was still a lack of funds to equalize aid to each house of worship in Mamasa district.

Keywords: Implementation, Grant Fund, People's Welfare Section

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan dana hibah keagamaan di bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten mamasa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan dana hibah keagamaan di bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten mamasa. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang berjumlah 12 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa yang di gunakan adalah analisa data kualitatif yang merupakan uraian serta menginterpretasikan data yang di peroleh di lapangan dari informan yang ada.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan dana hibah keagamaan di bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah mamasa berkaitan dengan indikator-indikator yang mempengaruhi keberlangsungan pelayanan di bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah di antaranya. Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Penerapan, yang mana menyimpulkan bahwa mekanisme dan tahapan penyaluran dana hibah termasuk di dalamnya kegiatan monitoring, evaluasi dan verifikasi oleh tim sudah tersedia walaupun masih kurangnya dana dalam untuk menyetarakan bantuan ke tiap rumah ibadah yang ada di kabupaten mamasa.

Kata kunci: Implementasi, Dana Hibah, Bagian Kesejahteraan Rakyat

Article history

DOI:

Received :2022 | Received in revised form :2022 | Accepted : 2022

1. PENDAHULUAN

Dengan perkembangan arus ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, tidak hanya mempengaruhi berbagai bidang pemerintahan dan swasta, tetapi juga infrastruktur publik yang semakin kompleks. Teknologi tidak diragukan lagi berakar pada kebutuhan manusia. Tentunya tanpa teknologi, subjek utamanya, manusia, tidak dapat bekerja atau bekerja dengan cepat, tepat, dan efisien sesuai keinginan orang lain (Arief Budiman, 2017).

Teknologi adalah ciri khas manusia. Singkatnya, bagian dari sejarah teknologi mencakup semua sejarah yang telah disentuh oleh teknologi. Selain teknologi yang baik, tentunya memberikan sistem pelayanan yang baik pula. Begitu pula dengan jasa organisasi pemerintah sebagai penyelenggara dan fungsinya sebagai pegawai negeri sipil.

Pelayanan dapat dilihat sebagai indikator utama kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik (PNS) dan sektor swasta. Menurut Syahrir dari Hardiansayah (2018), semua pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang dikemukakan Syahrir, Miftah Thoha (2013: 39) juga menyatakan. Kesejahteraan sosial adalah usaha individu atau kelompok untuk memberikan dukungan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, disebutkan pengertian pelayanan umum sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat maupun di daerah dan di lingkungan BUMN/BUMD, dalam bentuk barang/jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dan Peraturan Bupati Mamasa No 5 tahun 2021 tentang pedoman pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(Moenir, 2015:16), dalam suatu organisasi pemerintahan yang disebut lembaga pemerintah, menurut Pancasila dan UUD 1945, pelayanan administrasi yang prima diberikan, tergantung pada kewajiban dan fungsi pegawai negeri atau pejabat yang menjadi pegawai negeri dengan kewajiban kesetiaan dan kepatuhan. Diperlukan berkenaan dengan negara dan pemerintahan, ada kewajiban untuk menjaga keutuhan negara. Solihin (2017), sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola pelayanan kepada masyarakat, pemasangan sarana dan prasarana tersebut, serta pegawai negeri sipil (PNS), perlu didukung dengan kinerja yang baik.

Namun fakta empiris di daerah ini sangat sulit dan kompleks untuk menerima pelayanan publik di instansi pemerintah, staf untuk memajukan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan untuk kesejahteraan rakyat (warga negara) efektivitas pelayanan masyarakat dari negara kesejahteraan (Welfare state) Untuk tujuan pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan dan fungsinya didukung oleh peralatan/staf lokasi penelitian dari penulis yaitu Seksi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa yang terdiri dari berbagai seksi Seksi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.

Handayani (2013), Kenyataannya, karena merupakan proses kerja di wilayah ini, banyak pekerjaan administrasi yang dilakukan sebelum wilayah administrasi. Jenis pelayanan di bagian ini tidak sama dengan di kantor atau kantor lain seperti kantor kecamatan dan kantor desa. Jenis pelayanan di sini menitikberatkan pada sistem kebijakan dan prosedur kepala daerah yang memberikan tugas dan wewenang tertentu, terutama dalam bentuk pelaksanaan anggaran. Dengan melaksanakan tugas dan keistimewaan yang diberikan, maka pelaksana lembaga kemudian dapat bekerja.

Layanan ini tidak ditujukan untuk masyarakat umum, melainkan untuk kelompok atau kebutuhan tertentu di masyarakat. Misalnya, salah satu layanannya adalah untuk mendukung pendanaan keagamaan, seperti subsidi untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan rumah ibadah dengan jumlah penerima hibah rumah ibadah 94 dengan rincian gereja 73 dan mesjid 21. Oleh karena itu, hanya pihak yang berkepentingan saja yang dapat menerima pelayanan tersebut, dan pelaksanaan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan suatu sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu dalam contoh di atas, tempat peribadatan. Namun penulis tetap menjelaskan latar belakang permasalahan tersebut. Dengan kata lain, waktu penyelesaian seringkali diprioritaskan karena tidak ada kekurangan dari manajemen penunjang ini, seperti jumlah pegawai yang tidak mampu meningkatkan manajemen pelayanan manajemen. Dengan pengawasan anggaran yang dikeluarkan oleh kesejahteraan, bantuan untuk setiap kapel tidak merata, dan banyak bangunan yang belum selesai untuk memenuhi harapan masyarakat yang tinggal di sana. Saya butuh gedung. Oleh karena itu, dari sisi pembangunan, banyak rumah ibadah yang menjadi sasaran subsidi tahap akhir, banyak dibangun di luar sasaran sasaran.

Bidang pemerintahan yang diselenggarakan oleh kabupaten atau kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, koperasi, dan sumber daya manusia. Fasilitas pendukung untuk menciptakan dan mengimplementasikan layanan dan lingkungan kerja perlu dipenuhi dengan memberikan layanan yang konsisten, tepat waktu dan transparan. Hal ini didukung dengan suasana ruang yang memfasilitasi, yaitu sub bagian kesejahteraan sosial.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian atas kebijakan bantuan dana hibah yang telah di berikan oleh program Bagian kesejahteraan rakyat dan pelayanan dengan hasil dari pelayanan tersendiri, yang berjudul *"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN DANA HIBAH KEAGAMAAN DIBAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA"*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *Case Study* (studi kasus). *Case Study* adalah penelitian yang menggunakan bukti empiris dari satu atau lebih lembaga dan peneliti yang berusaha mempelajari suatu masalah dalam konteks. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan realistis fakta-fakta, sifat dan hubungan antara hal-hal dan fenomena yang sedang dipelajari (Indrawan dan Yaniawati, 2014). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan deskriptif dari segi kata dan bahasa, bahasa, dalam konteks tertentu adalah alam. dan menggunakan metode ilmiah yang berbeda (Moleong, 2016).

Lokasi penelitian ini adalah kantor sekretariat daerah bagian kesejahteraan rakyat yang terletak di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan, terhitung sejak bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2022. Teknik perolehan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan survei dokumentasi. Langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan implementasi kebijakan bantuan dana hibah keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa adalah untuk meringankan dan mengembangkan diri masyarakat sebagai manusia, sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat. Selain itu, pemberian dana hibah sesuai dengan amanat konstitusi yang diberikan kepada pemerintah melalui APBD.

(Yusuf Daud, 2021) Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh International Labor Organization (ILO). Untuk itu perlu diketahui seberapa besar keberhasilan implementasi kebijakan bantuan dana hibah keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, mengingat pentingnya pemberian dana hibah dalam rangka meringankan dan mengembangkan diri masyarakat.

Merujuk pada teori tentang Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh 4 indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan penerapan yang dijelaskan sebagai berikut ;

a. Komunikasi

Kejelasan terkait dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan bantuan dana hibah keagamaan pada bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten mamasa, kejelasan terkait dengan

bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dibuat, serta kejelasan dan pemahaman yang dimiliki oleh implementator dalam pelaksanaan kebijakan bantuan dana hiba keagamaan pada bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten mamasa (Agustino Leo, 2016).

Komunikasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi di karenakan melalui komunikasi pembuat keputusan dan kebijakan dapat mengetahui apa yang akan di kerjakan. Pengetahuan yang mumpuni dari para pengambil kebijakan nantinya akan diteruskan kepada sumber daya yang ada, yaitu pelaksana.

Penerus informasi menjadi penting, karena menjadi dasar untuk menjalankan kebijakan yang telah di tetapkan oleh para pengambil kebijakan. Komunikasi yang terjalin idealnya harus akurat, baik ditingkat pembuat keputusan maupun pelaksana

Demikian pula halnya dengan pembuat kebijakan, komunikasi yang baik antara pihak pelaksana dengan pimpinan, mampu mengoptimalkan implementasi bantuan dana hibah keagamaan pada bagian kesejahteraan rakyat. Melalui komunikasi yang akurat mampu menyelesaikan permasalahan dan kendala ditingkat pelaksana, dengan memperhatikan petunjuk dan masukan positif dari pimpinan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu. Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Dari hasil yang diperoleh disimpulkan bahwasanya komunikasi antar organisasi yang dilakukan oleh Biro Kesra dengan pihak yang berhak menerima hibah harus optimal dalam penyampaian komunikasinya. Seharusnya instansi-instansi yang terkait dari pelaksanaan bantuan ini wajib menyampaikan / mensosialisasikan kepada organisasi masyarakat dan pejabat setempat tentang adanya kebijakan tersebut. Sehingga bisa berkesempatan untuk mendapatkan bantuan dana hibah tersebut yang dimana bantuan itu bisa membuat kenyamanan dalam beribadah tersebut.

Dari hasil wawancara yang ada dapat di simpulkan bahwa ditingkat penerima bantuan dana hibah keagamaan, komunikasi yang terjalin sudah sangat baik. Hal ini dapat di tunjukkan dengan informasi yang tepat yang diterimah oleh masyarakat terkait danah hibah keagamaan di bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten mamasa. Komunikasi yang baik di harapkan tidak hanya terjadi di tingkat pelaksanaanya saja, namun jalur komunikasi hingga ke penerima bantuan perlu di perhatikan agar implementasi kebijakan bantuan dana hibah keagamaan dapat optimal.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud, yaitu sumber-sumber yang dapat mendukung serta menentukan keberhasilan pelaksanaan, dalam hal implementasi ini

sumber daya terpenting adalah sumber penggerak dan pelaksana, yaitu manusia (Nugroho, 2016).

Untuk menganalisis sumber daya pada bagian kesejahteraan rakyat diawali dengan jumlah pegawai yang ada, baik itu PNS dan Non-PNS. Dia menjelaskan bahwa mereka sudah bekerja dengan baik sehingga SDM yang ada sudah sangat baik yang mana subag kesejahteraan masyarakat sudah bekerja maksimal dalam memberikan layanan kepada rumah ibadah yang mendapat dana bantuan hibah dari kesra

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa secara kompetensi, profesionalisme, serata etika dan budaya kerja (kualitas) pegawai yang ada di lingkungan Bagian Kesra Sekretariat daerah Kabupaten Mamasa masih harus di tingkatkan dalam bentuk penambahan pegawai. Hal ini di sebabkan sering terjadi rotasi pegawai dan pengisian formasi pada masing-masing bagian dan sub bagian yang ada belum sesuai dengan kualifikasi kebutuhan, sehingga pegawai belum terlalu memahami secara mendalam mengenai prosedur dan penyaluran dana hibah. Hal ini berdampak pula pada implementasi kebijakannya.

Sebuah kebijakan bisa berhasil dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh banyak variabel baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi, salah satunya mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana yang bersedia memberikan pelayanan maksimal. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia sebagai pengelola bantuan dana hibah yang kompeten dan sumberdaya non manusia seperti komputer dan perangkat lunak penunjang kegiatan pengelolaan bantuan dana hibah yang memadai dan berfungsi dengan baik.

Sumber daya manusia dalam hal ini adalah staff ataupun anggota yang ada di bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan organisasi adalah faktor sumber daya manusia. Keberhasilan mutu bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya. Organisasi sektor publik sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya

Dari hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa kurangnya tenaga yang ada dalam hal ini sumberdaya manusianya menjadi suatuhambatan dalam pelaksanaan bantuan bidang keagamaan, dimana pelaksanaan ini juga memerlukan monitoring atau survey ke tempat tempat pemohon guna melakukan verifikasi apakah layak mendapatkannya, kurangnya jumlah pelaksana juga menjadi penghambat mengingat cakupan wilayah yang cukup jauh, waktu terbatas dan jumlah pelaksana yang tidak mencukupi

Jadi bedasarkan analisis yang dilakukan, keberhasilan implementasi kebijakan bantuan dana hibah pada bagian kesra sekretariat daerah kabupaten mamasa ini di pegangui oleh kurangnya pegawai yang ada di bagian kesra. Secara kuantitas jumlah pegawai yang masih di bawah standar jika dilihat dari jumlah sub bagian. Secara kualitas pegawai yang ada dan yang akan direkrut untuk memperkuat formasi pegawai pada bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten mamasa harus memperhatikan

kualitas dan profesionalisme yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah di ditetapkan.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam teori implementasi adalah karakteristik pelaksana. Karakteristik pelaksana ini ditunjukkan dengan sikap pelaksana dalam menerima sebuah kebijakan. Sikap positif akan mempermudah tercapainya tujuan yang di harapkan, demikian pula sebaliknya. Sikap negative dari pelaksana dan pembuat kebijakan akan mempersulit proses implementasi.

Untuk menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam hal ini yaitu, sejauh mana lingkungan eksternal mendukung kebijakan bantuan hibah bidang keagamaan ini. Dari hasil yang diperoleh kondisi lingkungan sosial sangat mendukung dengan adanya bantuan dana hibah bidang keagamaan ini, dimana dengan adanya bantuan seperti ini diharapkan dapat membuat kenyamanan masyarakat dalam melakukan rutinitas keagamaannya.

Selain lingkungan sosial, ada juga lingkungan ekonomi yang mendukung dari kebijakan bantuan hibah bidang keagamaan ini, lingkungan ekonomi dalam hal ini adalah bentuk kepedulian masyarakat tentang rumah ibadah yang ada di wilayahnya. Dimana dalam hal ini mengukur partisipasi masyarakat dalam hal menyumbang dana secara sukarela. partisipasi masyarakat dalam hal menyumbang dana masih rendah dan dengan kondisi seperti inilah dibutuhkan kepedulian dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memberikan kenyamanan dalam melakukan aktivitas rutin keagamaannya.

Dan yang terakhir lingkungan politik, dalam hal ini hubungan lingkungan politik dengan kebijakan bantuan hibah keagamaan membahas bagaimana partisipasi pejabat setempat mengenai bantuan ini. Dan apa pengaruh dari lingkungan politik ini terhadap kebijakan bantuan hibah. Dari hasil yang diperoleh disimpulkan bahwasanya kurangnya partisipasi dan kepedulian pejabat setempat dinilai menjadi hambatan terkait dengan pelaksanaan kebijakan bantuan hibah bidang keagamaan ini

Berdasarkan hasil analisis, disposisi pada keberhasilan implementasi kebijakan bantuan dana hibah keagamaan di bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten mamasa sejauh ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya yang tersedia. Jika kemampuan mengaplikasikan sistem dan mengerti alur dari proses mendapatkan bantuan ini maka akan terlaksana dengan baik maka disposisi akan berjalan dengan yang di harapkan.

d. Penerapan

Ketersediaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dana hibah sudah di atur dengan jelas melalui permendagri nomor 32 tahun 2011 dan permendagri nomor 39 tahun 2013.

Mekanisme dan tahapan penyaluran dana hibah termasuk di dalamnya jadwal kegiatan monitoring, evaluasi dan verifikasi oleh tim harus tersedia, demikian pula dengan program kerjanya. Idealnya program kerja dan jadwal kegiatan harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan.

Hasil analisis menunjukkan, implementasi kebijakan bantuan dana hibah secara umum sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang di tetapkan, namun dalam pelaksanaannya selalu akan jauh dari harapan yang di inginkan. Dengan bantuan dana ini masyarakat terbantu dalam membangun rumah ibadah mereka walaupun pemerataan belum sesuai dengan yang di harapkan karna terbatasnya dana yang ada.

Komunikasi, sumber daya, disposisi dan penerapan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan lagi penyesuaian dan perbaikan agar implementasi kebijakan bantuan dana hiba keagamaan di bagian kesra sekretariat daerah kabupaten mamasa dapat optimal dan bisa merata dengan tepat sasaran. Ke empat hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi harus saling bersinergi dan mampu berjalan minimal mendekati tingkat ideal, agar implementasi kebijakan bantuan dan hibah keagamaan dapat di jalankan tahun ketahun da nada meningkatkan di dlamnya berupa pemerataan di masyarakat.

Hasil Penelitian tersebut juga menegaskan Teori Edwards III bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan penerapan dan satu dengan yang lainnya saling terkait dalam proses implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian di atas maka dapat dikatakan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik dapat di lakukan dengan upaya meningkatkan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan penerapan secara bersama-sama

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian tentang implementasi kebijakan bantuan dana hibah pada bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten mamasa di pengaruhi oleh :

Komunikasi, yang mana indicator ini adalah bagaimna bagian kesradi sekretariat daerah meberikan pemahaman tentang apa itu dana hibah keagamaan serta bagaimna cara mendapatkan dana hibah tersebut di bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten mamasa.

Sumber Daya, indikator ini merumuskan tentang kuantitas dan kualitas sebuah pelayanan pegawai di bagian kesra yang mana kinerja pegawai sudah maksimal dalam memberikan layanan namun harapan

dari semua masyarakat yaitu harus adanya penambahan pegawai di bagian kesra agar layanan bisa lebih maksimal lagi kedepanya.

Disposisi, indikator ini terkait dengan kejelasan watak dan karakteristik yang di miliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan cara menerima pendapat orang lain dalam menyukseskan program kesejahteraan rakyat di sekretariat daerah kabupaten mamasa serta adanya pengakuan dari pemerintah tentang apa saja yang bisa mendapatkan bantuan dan layak untuk di berikan setelah adanya peninjauan dari tim serta pengakuan disposisi dari pemerintah kususnya bupati.

Penerapan, indikator ini menyimpulkan bahwa mekanisme dan tahapan penyaluran dana hibah termasuk di dalamnya kegiatan monitoring, evaluasi dan verifikasi oleh tim sudah tersedia walaupun masih kurangnya dana dalam untuk menyetarakan bantuan ke tiap rumah ibadah yang ada di kabupaten mamasa.

5. SARAN

Dari kesimpulan di atas maka muncul beberapa saran yaitu :

Secara teoritis untuk dapat meningkatkan implementasi kebijakan bantuan dana hibah keagamaan pada bagian kesra sekretariat daerah kabupaten mamasa maka diperlukan beberapa masukan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik menuju kabupaten yang berbudaya dan terdepan.

Secara praktis maka perlu di perhatikan beberapa hal yaitu :

Kompetensi, profesionalisme serta etika dan budaya kerja agar lebih di maksimalkan lagi, Kontrol dan pengawasan terhadap penerima bantuan harus lebih jelas masalah SPJ nya karena dengan melakukan pengawasan terhadap penerima bantuan maka akan meminimalkan kekeliruan dan kesalahan dalam pemberian bantuan hibah, Koordinasi dan komunikasi di tataran pelaksana, tim verivikasi ,maupun dengan calon penerima hibah keagamaan di harapkan dapat di tingkatkan lagi karena dengan komunikasi yang baik maka calon penerima hibah mendapatkan kepastian dan kejelasan apakah permohonan mereka di terima atau tidak. Dan tak kalah penting dalam pelaksanaan pemberian dana hibah terutama dalam hal penggunaan dan laporan pertanggung jawaban (SPJ) sebelum hibah di berikan pihak pemberi harus mensosialisasikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang harus di penuhi oleh penerima hibah dan bantuan social tersebut

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahhab Solichin, 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Agustino, Leo.2016. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Budiman, Arief. Dkk. 2017. *Biodisel Bahan Baku, Proses Dan Teknologi*. Yogyakarta . Gadjah Mada Press.
- Handayani, Debie, 2013. *Manajemen Bantuan Hibah Pemerintah Kota Tanjung Pinang (Studi Kasus*

Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung Pinang Tahun 2012). Naskah Publikasi

- Hardiansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Gava Media
- Indrawan, Rully., Yaniwati, R. Poppy. 2014. *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT. REFIKA ADITAMA
- Miftah, Thoha, 2013. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moenir, 2015. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D, Riant, 2016. *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rosmaida, Agustinus Sudi, Yusuf Daud, 2021. Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Tawalian, Jurnal Mitzal : UNASMAN, Polewali Mandar